

MENINGKATKAN LAPORAN SPT TAHUNAN PPH PASAL 21 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BAGI WARGA KECAMATAN LENGKONG BANDUNG

Oleh:

Ari Bramasto, Dudi Haryadi

Fakultas Ekonomi, Universitas Langlangbuana Bandung

arya_bravo@yahoo.com, duem.isdudi@gmail.com

ABSTRAK

Pelatihan Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2017 dilaksanakan di Kecamatan Lengkong. Pelatihan ini bertujuan dapat menambah pengetahuan bagi para warga tentang pelaporan pajak tahunan penghasilan 21 khususnya di lingkungan Kecamatan Lengkong dan dari pelatihan tersebut meningkatkan pengetahuan pelaporan pajak penghasilan sebagai bekal bagi para Warga Kecamatan Lengkong Bandung serta umumnya dapat mengikuti perkembangan perpajakan yang terjadi saat ini.

Kata Kunci: *SPT Tahunan PPh Pasal 21, Wajib Pajak Orang Pribadi*

ABSTRACT

Training for Filling Form in the Annual Income Tax Article 21 Individual Taxpayer Year 2017 is carried out in Lengkong District. This training aims to improve knowledge for residents about annual income tax reporting 21, especially in the Lengkong Subdistrict environment and from the training that improves knowledge of income tax reporting as provision for residents of Lengkong Bandung District aswell generally be able to keep track of the current tax developments.

Keywords: *The Annual Income Tax Article 21, Individual Tax Payer*

PENDAHULUAN

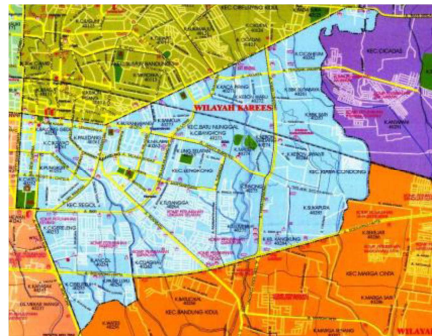
1. Analisis Situasi

A. Geografi

Kecamatan Lengkong merupakan salah satu dari 30 kecamatan di Kota Bandung yang termasuk bagian dari Wilayah Karees. Rata-rata ketinggian tanah di permukaan Kecamatan Lengkong adalah sekitar 700 meter dpl (di atas permukaan laut), dengan luas wilayah sebesar 574 hektar (Gambar 1) . Kecamatan Lengkong dan

Kecamatan Lengkong yaitu 574 hektar. Kelurahan Turangga merupakan kelurahan terluas, yaitu mencapai 166 hektar yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Batununggal. Kemudian Kelurahan Lingkar Selatan dengan luas 118 hektar. Kelurahan Cijagra seluas 102 hektar yang berbatasan dengan Kecamatan Bandung Kidul. Adapun Kelurahan Malabar, Kelurahan Cikawao, Kelurahan Burangrang dan Kelurahan Paledang memiliki luas wilayah di bawah 100 hektar.

Wilayah Karees Kota Bandung Luas



Gambar 1. Kecamatan Lengkong dan Wilayah Karees Kota Bandung

Tabel 1. Luas Wilayah di Kecamatan

KECAMATAN LENGKONG	
KELURAHAN	LUAS WILAYAH (Ha)
CIJAGRA	102
TURANGGA	166
LINGKAR SELATAN	118
MALABAR	67
BURANGRANG	52
CIKAWAO	37,5
PALEDANG	32,5
JUMLAH	574

B. Pemerintahan

Kecamatan Lengkong dipimpin oleh seorang camat yang berkedudukan dibawah Walikota/Bupati melalui Sekretaris Kota / Kabupaten Administrasi, sedangkan kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati melalui Camat. Roda pemerintahan di Kecamatan Lengkong secara administrasi pemerintahan dijalankan oleh 66 orang PNS yang bertugas di masing-masing kantor

kelurahan dan kantor kecamatan Lengkong. Pada tahun 2013 Komposisi PNS menurut jenis kelamin di Kecamatan Lengkong adalah sama antara laki-laki dan perempuan, yaitu masing-masing sebanyak 33 orang. Personil terbanyak bertugas di kantor kecamatan yaitu sebanyak 19 orang, formasi 6 laki-laki dan 13 perempuan. Apabila dirinci menurut golongan kepangkatan, maka terdapat 5 PNS yang masih berada pada golongan II, sebanyak 50 PNS golongan III.

Tabel 2. Jumlah PNS dan Non PNS di Kecamatan Lengkong Tahun 2013

No	Kelurahan / Kecamatan	PNS (Orang)		Non PNS (Orang)	
		L	P	L	P
1	Cijagra	3	4	1	-
2	Turangga	4	3	2	-
3	Lingkar Selatan	3	3	-	-
4	Malabar	4	3	-	1
5	Burangrang	6	1	-	-
6	Cikawao	5	1	-	-
7	Paledang	5	2	-	-
9	Kecamatan Lengkong	6	13	-	-
Jumlah		36	30	3	1

Dalam upaya memudahkan dalam koordinasi dan berjalannya roda tetangga (RT).

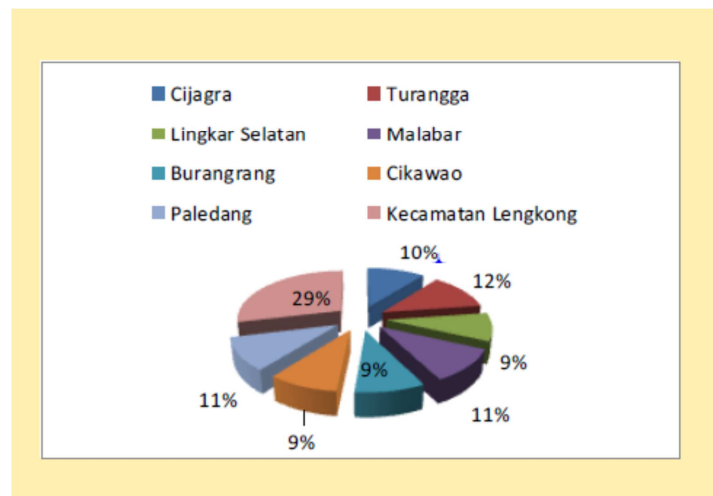
kepemerintahan di Kecamatan Lengkong, wilayah pemerintahannya dibagi menjadi 7 (tujuh) kelurahan yaitu cijagra, turangga, lingkar selatan, malabar, burangrang, cikawao, paledang. Sedangkan di setiap kelurahan dibagi menjadi beberapa rukun warga (RW) yang masing-masing rukun

Jumlah rukun warga (RW) dan rukun tetangga (RT) dari tujuh kelurahan di wilayah kecamatan Lengkong terdiri atas 65 RW dan 431 RT.

Tabel 3. Jumlah RW dan RT Kecamatan Lengkong Tahun 2015

Kelurahan	RW	RT
Cijagra	7	52
Turangga	11	84
Lingkar Selatan	10	74
Malabar	11	58
Burangrang	9	65
Cikawao	9	55
Paledang	8	43

Dari rincian tersebut terlihat bahwa dan RW yang paling sedikit adalah kelurahan kelurahan Turangga dan Malabar memiliki Cijagra yaitu sebanyak 7 RW. jumlah RW terbanyak yaitu sebanyak 11 RW



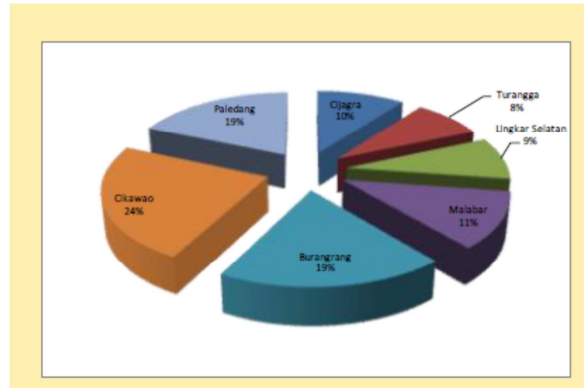
Grafik 1. Jumlah PNS masing-masing kelurahan di Kecamatan Lengkong

C. Kependudukan

Sensus Penduduk terakhir adalah melakukan survey untuk menghitung angka Sensus Penduduk 2010. Hasil Sensus proyeksi penduduk, sehingga angka Penduduk 2010 menunjukkan jumlah penduduk sesuai proyeksi penduduk penduduk Kecamatan Lengkong adalah Kecamatan Lengkong adalah sebanyak 69.307 jiwa, dengan komposisi 71.333 jiwa, dengan komposisi 35.262 jiwa 34.409 jiwa penduduk laki-laki dan 34.898 penduduk laki-laki dan 36.071 jiwa penduduk jiwa penduduk perempuan. Berdasarkan angka proyeksi

Dalam memenuhi kebutuhan data penduduk maka *sex ratio* Kecamatan jumlah penduduk setiap tahunnya BPS Lengkong adalah 98,04, yang berarti dari

setiap 100 jiwa penduduk perempuan Lengkong. Kepadatan penduduk Kecamatan terdapat 98 penduduk laki-laki. Dengan kata Lengkong tahun 2014 adalah 124 jiwa per lain, penduduk perempuan lebih banyak dari hektar. pada penduduk laki-laki di Kecamatan



Grafik 2. Kepadatan Penduduk Kecamatan Lengkong Tahun 2015

D. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat bangsa dan Negara (UU No.20/2003 tentang system pendidikan nasional). Maka dari itu upaya pemerintah sangatlah penting menjadi faktor penentu keberhasilan suatu bangsa.

Salah satu program Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat adalah melalui bidang pendidikan, diantaranya adalah meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun informal bagi masyarakat. Dengan tersedianya sarana pendidikan yang dekat dengan masyarakat, diharapkan masyarakat akan lebih mudah mengakses pendidikan

Sarana pendidikan formal yang dimiliki oleh Kecamatan Lengkong mulai dari SD, SMA, SMA dan Perguruan Tinggi sebanyak 76 sarana., yang terdiri dari sekolah negeri dan swasta. Pendidikan pra sekolah seperti TK pun tersedia dalam jumlah yang memadai, yaitu sebanyak 32 sekolah.

Tabel 4. Jumlah Pendidikan Formal Kecamatan Lengkong Tahun 2015

Kelurahan	TK	SD	SMP	SMA	Univ
Cijagra	5	3	0	0	1
Turangga	4	5	3	9	6
Lingkar Selatan	7	4	4	3	0
Malabar	4	4	5	5	0
Burangrang	3	2	2	6	2
Cikawao	2	0	0	0	2
Paledang	1	2	0	1	0

Permasalahan Mitra

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Karees merupakan salah satu unit kerja vertikal dari Direktorat Jenderal Pajak dengan cakupan kerja di sebagian wilayah Jawa Barat I. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor: Kep/267/KMK/1989, memutuskan bahwa 1 april 1989 seluruh Kantor Inspeksi Pajak yang berada di Indonesia namanya diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan di Bandung dipecah menjadi 4 Kantor Pelayanan Pajak, yaitu: Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur, Kantor Pelayanan Pajak Bandung Utara, Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat dan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah. Seiring perkembangan waktu dikeluarkan lagi Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor: KEP.94/KMK/1994, Kantor Pelayanan Pajak tersebut berubah menjadi 5 Kantor Pelayanan Pajak yaitu: Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, Kantor Pelayanan Pajak

Bandung Tegalega, Kantor Pelayanan Bandung Bojonegara, Kantor Pelayanan Bandung Cibeunying dan Kantor Pelayanan Pajak Cicadas. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor: 112/KMK/01/2007 Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur berubah nama Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees terhitung mulai tanggal 28 agustus 2008.

Sampai saat ini Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees beralamat Jl.Ibrahim Ajie (d/h Kiara Condong) No 372. Kawasan tersebut juga berbagi tempat dengan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Sumedang. Untuk Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karees meliputi: Kecamatan Batununggal, Kecamatan Regol, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Bandung Kidul, dan Kecamatan Kiaracondong.

Berikut adalah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Karees.

Tabel 5
 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Bandung Karees 2012-2016

Tahun	WP OP Terdaftar	WP OP Terdaftar Wajib SPT	Persentase Kepatuhan
2012	95.277	70.177	51%
2013	99.907	51.772	72%
2014	112.226	63.264	56%
2015	118.233	59.559	65%
2016	124.857	64.613	59%

Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa 2013 sebanyak 18.405 wajib pajak terdaftar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di SPT, tetapi pada angka rasio kepatuhan wajib KPP Pratama Bandung Karees belum pajak mengalami kenaikan yaitu sebesar 21% seluruhnya melaporkan SPT mereka kepada pada tahun 2013. Perbandingan antara tahun KPP Pratama Bandung Karees. Pengertian 2013 dengan 2014 terjadi kenaikan jumlah *self-assessment system* adalah sistem di mana wajib pajak yang terdaftar sebanyak 13.129 wajib pajak diberi kepercayaan oleh undang- wajib pajak orang pribadi dan jumlah wajib undang untuk menghitung, menyetor dan wajib pajak terdaftar SPT juga mengalami kenaikan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sebanyak 11.492 wajib pajak orang pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi pada persentase rasio kepatuhan wajib perpajakan yang berlaku (Maharani: 2015). pajak mengalami penurunan sebesar 16%.

Berdasarkan pengertian *self-assessment system* sebelumnya, penerapan *self-assessment system* wajib pajak pada KPP Perbandingan tahun 2014 dengan 2015 terjadi kenaikan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebesar 6.007 Pragma Bandung Karees belum diterapkan wajib pajak orang pribadi, berdasarkan angka sebagaimana mestinya, tergambar wajib pajak yang terdaftar SPT mengalami penurunan sebanyak 3.705 wajib pajak berdasarkan dari tabel 1.1 diatas bahwa wajib orang pribadi, tetapi berdasarkan angka rasio pajak yang terdaftar wajib SPT tidak kepatuhan wajib pajak sebesar 9%. sebanyak dengan wajib pajak yang terdaftar Perbandingan antara tahun 2015 dengan 2016 pada KPP Pragma Bandung Karees mulai terjadi kenaikan jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebanyak 6.624 wajib tahun 2012 sampai dengan 2016. Dilihat dari pajak orang pribadi dan berdasarkan jumlah kenaikan wajib pajak yang terdarter pajak orang pribadi dan wajib pajak terdaftar SPT mengalami sebanyak 3.870 dan penurunan terjadi pada wajib pajak terdaftar SPT mengalami jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT kenaikan sebesar 5.054 wajib pajak orang pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun

pribadi tetapi pada persentase rasio presentase yang tidak mengalami kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan sebesar 6%.

Berdasarkan penjelasan diatas, penerapan *self-assessment system* wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Karees belum tercermin baik dilihat masih terjadinya penurunan rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Bandung Karees. Berdasarkan hasil survey terhadap pihak KPP Pratama Bandung Karees salah satu faktor penyebab menurunnya rasio kepatuhan wajib pajak adalah masih adanya kekhawatiran wajib pajak menggunakan *e-filling* dalam pengisian SPT dan sosialisasi *e-filling* belum gencar dilakukan. Sehingga perlu dikaji lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut. Faktor-faktor yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah pengaruh pelaksanaan *self-assessment system*, pengetahuan perpajakan, dan pelaksanaan sosialisasi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees.

Mitra PkM yakni Kecamatan Lengkong merupakan salah Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karees. Di dalam negeri, rasio kepatuhan wajib pajak yang menjadi indikator kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan

peningkatan secara berarti.

Hal ini didasarkan jika kita melihat perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar (Widodo: 2010,66).

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi pajak menurut Adriani yang dikutip dan dialihbahasakan oleh Waluyo (2016:2) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Sedangkan definisi penerapan sistem SPT *Digital* menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam posisi <http://www.pajak.go.id> adalah sebagai berikut :

1. “Penerapan sistem SPT *Digital* adalah suatu kebijakan yang memerlukan terjadinya manajemen perubahan atau *change management*. Di dalam suatu manajemen perubahan, hal yang sulit adalah mengubah paradigma faktor manusia yang terlibat di dalam perubahan

itu, karena tidak jarang dijumpai keengganan atau resistensi”.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dalam membangun kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak antara lain salah satunya dengan melakukan sosialisasi. Sebagaimana dinyatakan Dirjen Pajak bahwa kesadaran membayar pajak datangnya dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi.

Tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah mindset masyarakat tentang pajak ke arah yang positif. Beragam bentuk sosialisasi bisa dikelompokkan berdasarkan:

a. Metode Penyampaian:

Penyampiannya bisa melalui acara yang formal ataupun informal. Acara formal biasanya menggunakan format acara yang disusun sedemikian rupa secara resmi. Contohnya: Sosialisasi bendaharawan, sosialisasi PPh 21 karyawan Pemda, seminar dan sebagainya. Acara informal biasanya menggunakan format acara yang lebih santai dan tidak resmi. Contohnya:

Ngobrol santai dengan wartawan, dengan tokoh masyarakat, dan sebagainya.

b. Segmentasi:

Bisa membaginya untuk kelompok umur tertentu, kelompok pelajar dan mahasiswa, kelompok pengusaha tertentu, kelompok profesi tertentu, kelompok/ormas tertentu. Menanamkan kesadaran tentang pajak sejak dini, akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir anak-anak dan menimbulkan rasa kebanggaan terhadap pajak. Mungkin perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan format yang beragam, kreatif serta inovatif.

c. Media yang dipakai:

Sosialisasi dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. Misalnya: dilakukan dengan talkshow di radio atau televisi, membuat opini, ulasan dan rubrik tanya jawab di koran, tabloid atau majalah. Iklan pajak pun mempunyai pengaruh dan dampak positif terhadap meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak. Bentuk propaganda lainnya seperti: spanduk, banner, papan iklan/billboard, dan sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Luaran dan target capaian pengabdian pada masyarakat sebagai berikut:

Tabel 6. Rencana Target Capaian Luaran

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada Jurnal ber ISSN/Prosiding jurnal Nasional ¹⁾	Ada (Maksimal 1 tahun)
2	Publikasi pada media masa cetak/online/repository PT) 6	Belum (6 Bulan)
3	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya) ⁴⁾	Tidak Ada
4	Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen) ⁴⁾	Penerapan
5	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan) ²⁾	Sudah dilaksanakan
Luaran Tambahan		
1	Publikasi di jurnal internasional ¹⁾	Tidak Ada
2	Jasa; rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang ⁵⁾	Tidak Ada
3	Inovasi baru TTG ⁵⁾	Penerapan
4	Hak kekayaan intelektual (Patent, Patent sederhana, Hak Cipta, Merek dagang, Rahasia dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu) ³⁾	Tidak Ada
5	Buku ber ISBN ⁶⁾	Tidak Ada

Keterangan:

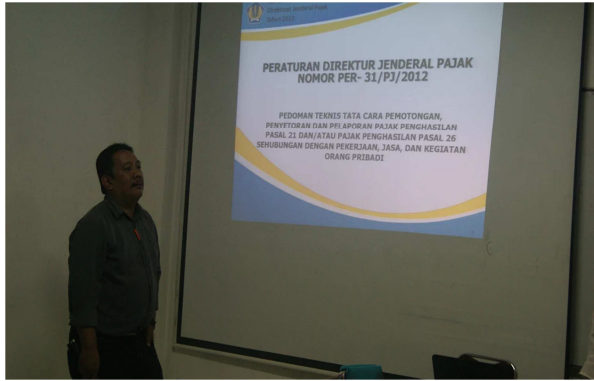
- 1) Isi dengan belum/tidak ada, draf, *submitted, reviewed*, atau *accepted/published*
- 2) Isi dengan belum/tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan
- 3) Isi dengan belum/tidak ada, draf, atau terdaftar/*granted*
- 4) Isi dengan belum/tidak ada, produk, penerapan, besar peningkatan
- 5) Isi dengan belum/tidak ada, draf, produk, atau penerapan
- 6) Isi dengan belum/tidak ada, draf, proses *editing/sudah terbit*

GAMBARAN IPTEK

Gambaran Iptek pada mitra pengabdian pada masyarakat sebagai berikut:



Foto-Foto Kegiatan



Sosialisasi Pajak oleh Ketua PkM



Anggota Team Pkm Sosialisasi

Peserta Sosialisasi



Kinerja Sosialisasi Perpajakan

No.	Pernyataan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Setuju	Sangat Setuju
PEMBICARA :					
1.	Menguasai materi			9	11
2.	Komunikatif			12	8
3.	Menarik			10	10
4.	Presentasi audiovisualnya menarik			9	11
5.	Tepat waktu			12	8
6.	Memberi kesempatan untuk diskusi			10	10
MATERI					
7.	Sasaran/tujuan seminar jelas			8	8
8.	Relevan dengan program studi Sistem Komputer			11	9
9.	Bermanfaat untuk mahasiswa/dosen			13	7
10.	Sesuai dengan harapan Saya			15	5
11.	Cakupan materinya memadai			12	8
12.	Sesuai dengan perkembangan di industri/praktisi			10	10
SUASANA					
13.	Membosankan	11	9		
14.	Monoton/Kurang menarik	10	10		
15.	Banyak diskusi	8	12		
16.	Peserta seminar pasif	9	11		
17.	Tepat waktu	10	10		
SARANA/PRASARANA					
18.	Seminar kits lengkap			12	8
19.	Fasilitas audiovisual lengkap			10	10
20.	Rehat kopi dan makan siang memadai			11	9
21.	Panitia seminar bekerja dengan baik			12	8

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- Dari kegiatan pengabdian masyarakat dalam penyampaian materi hasilnya baik dan dapat diterima.
- Dari kegiatan pelatihan aplikasi e-filing hasilnya sudah cukup baik, sedangkan untuk beberapa peserta pelatihan yang kurang menguasai teknologi informasihasilnya kurang memuaskan.

Saran

- Jangka waktu pelaksanaan sebaiknya diperpanjang mengingat bukan pekerjaan mudah dalam transfer ketrampilan dalam waktu yang relatif singkat.
- Program Kemitraan Masyarakat ini dapat dilangsungkan di kecamatan lain.
- Dana yang dibutuhkan lebih ditingkatkan besarnya agar hasilnya lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ramdani, 2015. *Statistik Kecamatan Lengkong Bandung 2016*: Bandung, Badan Pusat Statistik Kota Bandung
- Erly Suandy, 2014, *Hukum Pajak*, Edisi Empat, Jakarta: Salemba Empat.
- Indra Ismawan. 2011. *Reformasi Perpajakan*. Jakarta. PT. Salemba Empat.
- Liberti Pandiangan. 2007. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016: Yogyakarta: Andi.
- Nur Indriantoro, Bambang Supomo. 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen (Edisi 1)*, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Robert Pakpahan and Toyomu Yuasa. 2004. *Menuju Sistem dan Administrasi Perpajakan Berkelas Dunia*. Jakarta: PT Kharisma Bintang Kreativitas Prima.
- Siti Resmi. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*, Edisi Sembilan, Jakarta: Salemba Empat.
- Sony Devano, dan Siti Kurnia Rahayu, 2014, *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*, Satu, Jakarta: Kencana
- Waluyo. 2016. *Akuntansi Pajak Edisi 6*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Waluyo dan Ilyas B Wirawan. 2016. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 12 Jakarta: Salemba Empat
- www.pajak.go.id